

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Provinsi Jawa Tengah

Halaman 1 dan 7

Pilgub Kurang Dana Rp863 Miliar (1)

■ Bakal Bebani APBD Jateng 2018
■ Pemprov Dituding Ceroboh

SEMARANG - Anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018 kurang Rp 863 miliar. Total kebutuhan anggaran Pilgub sendiri mencapai Rp1,3 triliun hanya untuk penyelenggara Pilgub saja, belum termasuk keamanan.

Atas kekurangan tersebut, beban anggaran dianggap akan lebih berat saat pemenuhan pada APBDP 2017 dan APBD murni 2018.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro menyayangkan pihak eksekutif tidak mengomunikasikan hal tersebut sebelumnya. Meski anggaran Pilgub tetap akan dipenuhi, namun solusi agar tidak membebani pada APBD 2018 bisa dibahas bersama.

"Dulu da-
na cadangan Rp550 miliar saat 2016 dikatakan ada, bahkan sudah menjadi berbentuk Perda. Namun tadi penjelasannya memang anggaran pemprov me-
Bersambung ke hal 7 kol 3

Kebutuhan Dana Pilgub Jateng

Total Anggaran: 2018 Rp1,3 triliun	
2015	Rp 200 M
2016	Rp 550 M
2017	Rp 300 M

Pengalokasian Anggaran

Keamanan Polda Rp 56 M	Satpol PP Provinsi Jateng Rp 12,12 M	Keamanan Keshang Rp 2,1 M	Bawaslu Rp 293 M	KPU Rp 992 M
---------------------------	---	------------------------------	---------------------	-----------------

Kekurangan Dana Rp 863 M

Sumber: Pemprov Jateng

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Provinsi Jawa Tengah

Halaman 1 dan 7

Pilgub Kurang Dana Rp863 Miliar (2)

Pilgub

(Sambungan hlm 1)

ngalami liquiditas yang tidak memungkinkan untuk menganggarkan Pilkada (Pilgub) dengan dana cadangan. Jujur saya kaget kalau dana cadangan saat ini kosong," terang Sriyanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) persiapan Pilgub Jateng 2018 di Ruang Komisi A DPRD Jateng Jalan Pahlawan, Kamis (6/7).

Politikus Partai Gerindra tersebut menginginkan agar pihak eksekutif lebih berhati-hati dan bijak lagi dalam permasalahan anggaran. "Jangan sampai jadi preseden buruk. Prosedur penganggaran harus benar, apa lagi sudah jadi Perda. Beban alokasi anggaran jadi tinggi nanti di 2018," tegas Sriyanto.

Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, keseluruhan kekurangan anggaran pelaksanaan Pilkada tersebut akan dilunasi pada APBD murni 2018. Pada 2017 pihaknya mengalokasikan dana Pilgub dalam APBD murni sebesar Rp300 miliar, dengan rincian KPU Rp250 miliar dan Bawaslu Rp50 miliar. Sementara, pada anggaran APBD Perubahan 2017, KPU dianggarkan Rp180 miliar, dan Bawaslu 17,67 miliar.

Dalam RDP, Sumarno mengaku pada 2015 menganggarkan Pilgub dengan dana ca-

dangan Rp200 miliar. Hanya saja, kondisi kas daerah (Kasda) saat 2016 kolaps, lantaran target pendapatan asli daerah (PAD) tidak terpenuhi. Tak hanya itu, dana alokasi usaha (DAU) 2016 dari Kementerian Keuangan juga baru ditransfer ke rekening Provinsi Jateng pada 31 Desember 2016.

"Pada 2016 kami tidak mengalokasikan untuk Pilkada karena DAU di-pending, akhirnya karena liquiditas Kasda tidak ada, sehingga dana cadangan Pilkada kemarin tidak dicairkan. Belum lagi kita juga punya hutang bagi hasil di kabupaten/kota, sehingga belum dibagi ke kabupaten/kota, sekitar Rp400 miliar. Silpa 2016 saat itu mencapai Rp460 miliar. Uang BLU Rp130M. Kalau dieksekusi semua, maka minus di Kasda," jelas Sumarno.

Dalam rapat, Ketua KPU Provinsi Jateng, Joko Purnomo mengatakan, kebutuhan total KPU dalam Pilgub 2018 mencapai Rp992 miliar. Dalam hitungannya, KPU memerlukan anggaran Rp433 miliar untuk pelaksanaan tahapan Pilgub 2017 hingga Februari 2018. Sisa kebutuhan anggaran sebesar Rp588 miliar akan dibayarkan pada 2018.

Kebutuhan tersebut, kata Joko, digunakan untuk proses persiapan Pilgub 2018 yang tahapannya dimulai Juli 2017, hingga penetapan Paslon pada Februari 2018. Tak hanya itu, proses sosialisasi dan tahapan

lain di 2017 juga sudah diperhitungkan.

Sementara, Staf Alhi Kesbangpolinmas Provinsi Jateng, Purwanto mengatakan, dalam Pilgub 2018, pihaknya membutuhkan anggaran Rp2,1 miliar yang dialokasikan untuk pengamanan di kabupaten/kota. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng diklasterkan daerah A yakni pelaksana Pilgub dan Pilkada 2018 di tujuh daerah mendapatkan alokasi dana Rp60 juta. Daerah B yakni bukan pelaksana Pilkada dialokasikan Rp50 juta di 24 daerah, dan daerah C sebanyak empat daerah masing-masing mendapatkan Rp40 juta.

Untuk keamanan di kepolisian, kata Purwanto, Polda Jateng mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp56 miliar, TNI Rp7,75 miliar, dan Satpol PP Rp12,1 miliar.

■ Ceroboh

Kekurangan anggaran Pilgub ini dianggap pengamat politik dan pemerintahan Undip, Teguh Yuwono sebagai kecerobohan. Pasalnya, Pilgub merupakan pekerjaan rutin periode yang mempertaruhkan masa depan demokrasi di Jateng.

Teguh menyampaikan, anggaran Pilgub di Jateng dinilai lebih murah dibanding wilayah lain, lantaran dilaksanakan hanya satu putaran. Pengalokasian anggaran tersebut semestinya dipersiapkan sejak awal, agar tidak mengganggu kinerja

penyelenggara Pilgub yakni KPU dan Bawaslu.

"Tidak bisa tidak segera dipenuhi hanya dengan alasan Kasda kosong. Pilgub ini agenda rutin, menyangkut masa depan demokrasi kita. Pertanyaannya, kenapa eksekutif bisa lalai? Sekda dan Gubernur harus punya kebijakan konkret untuk ini. Publik tahunya beres, agenda rutin dan menyangkut masa depan politik lokal," ungkap Teguh saat dihubungi Wawasan.

Target PAD yang tak terpenuhi, terangnya, semeskinnya tidak menjadi masalah. Jika Pilgub dianggap penting, maka prioritas penganggaran tidak akan kalah dengan program lainnya.

"Jadi bisa realokasi, dengan merevisi alokasi anggaran lain yang tidak penting, dialokasikan ke Pilgub. Sehingga pemenuhan kebutuhan anggaran tidak sampai sebanyak ini. Jadi tahun pelaksanaan Pilgub bisa jalan tanpa mempengaruhi penyelenggara harus terlalu mengefisiensikan anggarannya," imbuhnya. Tak hanya itu, anggaran Pilkada satu putaran bisa diestimasi bisa hemat hingga 40 persen.

Jangan sampai, lanjutnya, kasus kekurangan anggaran Pilgub seperti Pekalongan. Saat pelaksanaan Pilkada, Pekalongan sama sekali belum menganggarkan. "Itu konyol, harusnya tiap tahun ada. Harusnya tidak terjadi," tandasnya. ■ M9-yan